

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGUNGKAPAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat)**

Putri Puspita Ayu

Universitas Swadaya Gunung Jati

puspitaayu12@gmail.com

Abstract: *This research was conducted to analyze the factors that influence the Local Government Financial Report, case study at the Government of Regency and City in West Java. This research uses analytical descriptive method. In collecting data conducted, the researchers conducted data collection through field research and library research. The author obtained research data from the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK is a State institution in the Indonesian state administration system which has authority to examine the management, financial responsibility of the State and the Region. Factors disclosure of Local Government Financial Statements proxied by total realization of regional expenditure, total assets, level of dependence, and audit opinion. Where based on statistical results indicates that the total realization of regional expenditure has no influence on full disclosure of Local Government Financial Statements while Total assets, level of dependence, and audit opinion have a significant influence on full disclosure of local government financial statements.*

Keywords: *Dependency Level, Audit Opinion, Disclosure of Government Financial Report*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah studi kasus pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam pengumpulan data yang dilakukan, peneliti melakukan pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penulis memperoleh data penelitian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK adalah lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan, tanggung jawab keuangan Negara dan Daerah. Faktor-faktor pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diroksikan kedalam total realisasi belanja daerah, total asset, tingkat ketergantungan dan opini audit. Dimana berdasarkan hasil statistik menunjukkan bahwa total realisasi belanja daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan penuh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan Total asset, tingkat ketergantungan, dan opini audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan penuh laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Tingkat Ketergantungan, Opini Audit, Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah

1. PENDAHULUAN

Undang-undang mengamanatkan agar Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran. Laporan keuangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan daerah, oleh karenanya laporan keuangan harus dilampiri dengan pengungkapan (*disclosure*).

Pengungkapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Salah satu prinsip akuntansi adalah pengungkapan lengkap (*full disclosure*), artinya laporan keuangan harus disajikan secara lengkap meliputi informasi-informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Laporan tersebut biasa disebut Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Pengungkapan laporan keuangan merupakan suatu bentuk pengungkapan informasi keuangan yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan yang menekankan pada penjelasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan menunjukkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan, aset dan belanja pemerintah dalam membiayai pengeluarannya.

Transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dapat tercapai jika pemerintah daerah menyajikan pengungkapan laporan keuangan secara penuh. Oleh karenanya, pengungkapan laporan keuangan merupakan hal penting demi mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel, selain itu hasil penelitian terdahulu menunjukkan belum adanya konsistensi hasil penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Barat)”.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah faktor total belanja, total aset, tingkat ketergantungan, dan opini audit mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor total belanja, total aset, tingkat ketergantungan, dan opini audit mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

Erlina dan Rasdianto (2013) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memuat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam penyusunan Laporan Keuangan. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan laporan keuangan hasil konsolidasian laporan keuangan masing-masing SKPD dibawahnya. Dalam LKPD disajikan perbandingan

antara realisasi pendapatan, belanja, dan transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, menyajikan posisi keuangan pemerintah dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Catatan atas laporan keuangan harus menyajikan dan menjelaskan informasi tentang hasil aktivitas setiap entitas sehingga laporan keuangan dapat menggambarkan secara tepat kondisi keuangan yang berpengaruh terhadap kegiatan operasional entitas tersebut.

Catatan atas Laporan Keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Masing-masing akun dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas harus dijelaskan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sesuai dengan prinsip akuntabilitas, laporan keuangan harus diungkapkan secara jelas dengan menyajikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Hal tersebut merupakan bentuk perwujudan dari pelaksanaan good governance di pemerintah daerah.

2.2 Belanja Daerah

Pengertian belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (PSAP No.2, Paragraf 7). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah bahwa pengertian belanja daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

2.3 Total Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Standar Akuntansi Pemerintahan). Kekayaan daerah dapat dilihat pada angka total aset yang terdiri dari total aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya yang dimiliki oleh kabupaten/kota.

2.4 Tingkat Ketergantungan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didanai dari dan atas beban APBD. Namun kemampuan asli sebagian besar daerah yang tercermin dalam pendapatan asli daerah (PAD) hanya mampu mengumpulkan tidak lebih dari 15% nilai PAD. Dalam arti tidak semua pemerintah daerah dapat memenuhi pembiayaan daerahnya. Karena itu pemerintah daerah kabupaten/kota masih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat untuk membiayai program/kegiatan pemerintah daerah dalam menjamin terselenggaranya

pembangunan dengan baik sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan daerah. Demi terwujudnya tujuan otonomi daerah maka urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah disertai juga dengan penyerahan dana atau transfer keuangan sehingga mencerminkan adanya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya ketergantungan pemerintah daerah kabupaten/kota pada pemerintah pusat maka semakin besar pula desakan dari pemberi bantuan (pemerintah pusat) untuk mendapatkan laporan pertanggungjawaban atas pemakaian dana bantuan tersebut.

2.5 Opini Audit

Opini Audit merupakan pendapat dari auditor atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini dilakukan oleh BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK menyebutkan bahwa BPK sebagai satu-satunya auditor yang mempunyai wewenang untuk memeriksa laporan keuangan semua Badan Eksekutif pemerintahan di Indonesia yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

3. METODOLOGI

Model Analisis Data yang digunakan adalah Model regresi logistik atau disebut juga model logistik merupakan salah satu bagian dari analisis regresi, yang digunakan untuk memprediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa, dengan mencocokkan data pada fungsi logit kurva logistik. Regresi logistik tidak memerlukan asumsi normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi dikarenakan variabel terikat (Y) yang terdapat pada regresi logistik merupakan variabel *dummy* yaitu dengan nilai 0 atau 1. Sehingga residualnya tidak memerlukan ketiga pengujian tersebut. Pada asumsi multikolinieritas, karena hanya melibatkan variabel-variabel bebas maka masih perlu untuk dilakukan pengujian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum. Variabel ini menggunakan empat variabel independen dan satu variabel dependen yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan total belanja, total asset, tingkat ketergantungan, dan opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Deskriptif variabel atas data dilakukan selama dua tahun. Untuk memberikan gambaran statistik deskriptif, berikut ini tabel statistik deskriptif dari masing-masing variabel dengan SPSS 21:

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
X1	54	27.184846733193	31.2746579980	28.452855674	.74334596508	.553
X2	54	28.062921141380	30.9849227141	29.187336005	.70590641817	.498
X3	54	.0716633347895	.918873769778	.73896669535	.14503805361	.021

X4	54	.3010299956632	.698970004336	.54001241076	.11604628842	.013
Y	54	0	1	.94	.231	.053
Valid N (listwise)	54					

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

Berdasarkan table 1 tersebut diketahui statistik deskriptif masing-masing variabel dari 54 data sampel Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Barat yang diteliti. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 0,00 dan paling tinggi (*maksimum*) sebesar 1,00, nilai rata-rata (*mean*) 0,94 dan standar deviasi 0,231. Nilai *mean* > standar deviasi ($0,94 > 0,231$) itu artinya data Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) memiliki perbedaan yang relatif kecil antara masing-masing data penelitian (data variatif).

Total Realisasi Belanja Daerah (X_1) memiliki nilai paling rendah (*minimum*) sebesar 27.184846733193 diperoleh oleh Pemerintahan Kota Banjar pada tahun 2014 dan paling tinggi (*maksimum*) sebesar 31.2746579980 diperoleh oleh Kabupaten Bandung pada tahun 2014, nilai rata-rata (*mean*) 28.4528556740 dan standar deviasi 0.743345965081. Nilai *mean* > standar deviasi artinya data total realisasi belanja daerah (X_1) memiliki nilai yang hampir sama antara masing-masing data (tidak variatif).

Total Aset (X_2) memiliki nilai paling rendah (*minimum*) sebesar 28.062921141380 diperoleh oleh Pemerintahan Kota Banjar pada tahun 2013 dan paling tinggi (*maksimum*) sebesar 30.9849227141 diperoleh oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014, nilai rata-rata (*mean*) 29.187336005 dan standar deviasi 0.70590641817. Nilai *mean* > standar deviasi itu artinya data total aset (X_2) memiliki nilai yang hampir sama antara masing-masing data penelitian (tidak variatif).

Tingkat Ketergantungan (X_3) memiliki nilai paling rendah (*minimum*) sebesar 0.0716633347895 diperoleh oleh Pemerintahan Kota Tasikmalaya pada tahun 2014 dan paling tinggi (*maksimum*) sebesar 0.918873769778 diperoleh oleh Pemerintahan Kabupaten Subang pada tahun 2013, nilai rata-rata (*mean*) 0.73896669535 dan standar deviasi 0.14503805361. Nilai *mean* > standar deviasi itu artinya data tingkat ketergantungan (X_3) memiliki nilai yang hampir sama antara masing-masing data penelitian (tidak variatif).

Opini Audit (X_4) memiliki nilai paling rendah (*minimum*) sebesar 0.3010299956632 diperoleh oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung pada tahun 2013 dan paling tinggi (*maksimum*) sebesar 0.698970004336 diperoleh oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013, nilai rata-rata (*mean*) 0.54001241076 dan standar deviasi 0.11604628842. Nilai *mean* > standar deviasi itu artinya data opini audit (X_4) memiliki nilai yang hampir sama antara masing-masing data penelitian (tidak variatif).

4.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik adalah analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh total belanja, total asset, tingkat ketergantungan dan opini audit terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se Provinsi Jawa Barat.

4.2.1 Uji Kelayakan Model Regresi (*Hosmer and Lemeshow's goodness of fit test*)

Uji kelayakan model (*goodnes of fit test*) dilakukan untuk mencocokkan data empiris dengan model sehingga dikatakan *fit* dengan data uji. Uji kelayakan model dapat dilihat dari besarnya nilai statistik *Hosmer and Lameshow's Goodness of Fit Test* dengan pendekatan *chi-square*. Jika nilai statistik *Hosmer and Lameshow's* lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga model mampu memprediksi nilai observasinya. Berikut adalah hasil uji *Hosmer and Lameshow's Goodness of Fit Test*:

Tabel 2. *Hosmer and Lemeshow Test*

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	,028	8	1,000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

Analisis Pertama yang dilakukan adalah menilai kelayakan model regresi. Dengan memperhatikan nilai *goodness of fit test* yang diukur dengan nilai *Chi-square* pada bagian bawah uji *homer and lemeshow*. Berdasarkan tabel 2 probabilitas menunjukkan angka 1,000 dimana $1,000 > 0,05$ maka H_0 diterima. Hal ini berarti model regresi layak dipakai untuk analisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaan nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

4.2.2 Menilai Keseluruhan Model (*overall fit model test*)

Tes statistik *Chi Square* (x^2) digunakan berdasarkan pada fungsi *Likelihood* pada estimasi model regresi logistik. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui model regresi baik atau tidak. Penggunaan x^2 untuk keseluruhan model dilakukan dengan membandingkan antara *-2 Likelihood* (*-2LL*) pada awal (*Block number = 0*) dengan nilai *-2 Log likelihood* (*-2LL*) pada akhir (*Block number = 1*). Adanya penurunan nilai antara *-2 LL* awal dengan nilai *-2 LL* pada langkah berikutnya (*-2 LL* akhir) menunjukkan model yang dihipotesiskan *fit* dengan data. Hasil Pengujian *Likelihood* adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Uji *Likelihood* Hasil *Block Number 0*

		Iteration History ^{a,b,c}	
Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	69,663	-,933
	2	69,590	-1,010
	3	69,590	-1,012
	4	69,590	-1,012

a. Constant is included in the model.

b. Initial *-2 Log Likelihood*: 69,590

c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

Tabel 4. Uji *Likelihood* Hasil *Block Number 1*

		Iteration History ^{a,b,c,d}					
Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients				
			Constant	X1	X2	X3	X4
Step 1	1	29,216	-1,578	-1,096	-7,433	-,017	1,229
	2	16,655	-2,536	-1,731	-14,362	-,447	1,990
	3	10,941	-3,470	-2,428	-22,944	-1,797	2,808
	4	8,084	-4,495	-3,213	-33,956	-2,842	3,739
	5	6,724	-5,801	-4,083	-47,000	-3,470	4,892
	6	6,163	-7,393	-4,982	-60,454	-3,637	6,258
	7	5,970	-8,940	-5,841	-73,237	-3,647	7,517
	8	5,929	-9,982	-6,731	-82,118	-3,647	8,331
	9	5,925	-10,322	-7,638	-85,051	-3,647	8,594
	10	5,924	-10,357	-8,339	-85,341	-3,647	8,622
	11	5,924	-10,364	-8,523	-85,395	-3,647	8,629
	12	5,924	-10,364	-8,527	-85,398	-3,647	8,629
	13	5,924	-10,364	-8,527	-85,398	-3,647	8,629

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 69,590

d. Estimation terminated at iteration number 13 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

Tabel 5. Hasil Uji *Likelihood*

-2Log Likelihood Awal (Block Number 0)	69,590
-2Log Likelihood Akhir (Block Number 1)	5,924

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

Langkah selanjutnya melalui keseluruhan model (*overall model fit*). Dengan memperhatikan angka -2 Log Likelihood (LL). Dimana pada awal (*Block number = 0*) angka -2 LL adalah 69,590 sedangkan pada akhir (*Block number = 1*) angka -2 LL turun menjadi 5,924. Penurunan Log Likelihood sebesar 63,666 (69,590-5,924) ini menunjukkan model regresi yang baik.

4.2.3 Cox dan Snell's R Square dan Nagelkerke's R Square

Cox dan Snell's R Square dan Nagelkerke's R Square memiliki fungsi untuk melihat kemampuan variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variabel dependen (terikat). Nilai Nagelkerke's R Square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell's R Square yang hanya memiliki nilai maksimum kurang dari 1. Nilai Nagelkerke's R Square dapat diinterpretasikan seperti nilai R² pada *multiple regression* karena memiliki nilai 0 sampai 1, dimana semakin mendekati 1 berarti semakin besar variabel independen mampu menjelaskan terjadinya variabel dependen.

Berikut adalah hasil uji Cox dan Snell's R Square dan Nagelkerke's R Square:

Tabel 6. Hasil uji *Cox dan Snell's R Square dan Nagelkerke's R Square*

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	5,924 ^a	,654	,953

a. Estimation terminated at iteration number 13 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 6 bahwa nilai *Nagelkerke's R Square* sebesar 0,654. Sedangkan nilai *Cox dan Snell's R Square* Nilai *Nagelkerke's R Square* sebesar 0,953 yang berarti variabelitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu sebesar 95%. Maka 5% (100%-95%) variabelitas variabel dependen dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar penelitian atau yang diteliti.

4.2.4 Tabel Klasifikasi 2x2

Tabel Klasifikasi 2x2 menghitung nilai estimasi yang benar (*correct*) dan salah (*incorrect*) dan digunakan sebagai penguat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data hasil observasi peneliti dengan data hasil prediksi.

Berikut ini adalah tabel estimasi pemerintahan yang mengungkapkan laporan keuangan pemerintah daerah secara penuh dan pemerintah yang tidak mengungkapkan laporan keuangan pemerintah secara penuh.

Tabel 7. Tabel Klasifikasi 2x2

Observed		Classification Table ^a			
		Predicted		Percentage Correct	
		Y			
		,00	1,00		
Step 1	Y	,00	35	1	97,2
		1,00	1	17	94,4
	Overall Percentage				96,7

a. The cut value is ,500

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

Tabel 7 menunjukkan hasil perhitungan nilai estimasi yang benar (*correct*) dan salah (*incorrect*). Pada bagian kolom merupakan dari variabel dependen, dalam penelitian ini yaitu laporan auditor independen yang menyatakan pengungkapan penuh (full disclosure) (1) dan tidak mengungkapkan secara penuh (0). Selanjutnya pada bagian baris menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen pengungkapan penuh (1) dan tidak mengungkapkan (0).

Hasil dari pengujian SPSS menunjukkan bahwa pada kolom, pemerintah yang termasuk menyatakan laporang keuangan secara penuh (1) ada 18 pemerintah daerah. Hasil selanjutnya yaitu pada bagian baris yang menunjukkan nilai observasi sesungguhnya menunjukkan ada 17 pemerintah daerah dalam kategori mengungkapkan

laporan keuangan secara penuh (1). Jadi presentase ketepatan model ini yaitu 17/18 atau 94,4%.

4.2.5 Estimasi Parameter dan Interpretasi

Pada regresi logistik digunakan uji estimasi parameter dan interpretasi untuk mengetahui pengaruh total belanja, total asset, tingkat ketergantungan dan opini audit terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se Provinsi Jawa Barat. Hasilnya dapat dilihat pada *variabel in the equation* sebagai berikut:

Tabel 8. Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	X1	-8,527	45,362	,035	1	,851	,000
	X2	-85,398	67,897	1,582	1	,028	,000
	X3	-3,647	1,120	10,604	1	,001	,026
	X4	8,629	6,742	1,638	1	,021	5591,255
	Constant	-10,364	8,022	1,669	1	,196	,000

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 8 diperoleh persamaan regresi logistik total belanja, total asset, tingkat ketergantungan dan opini audit terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada pemerintah daerah se-Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

$$\ln = \frac{LK \text{ Disclosure}}{1 - LK \text{ Disclosure}} = -10,364 - 8,527X1 - 85,398X2 - 3,647X3 + 8,629X4 + e$$

Persamaan regresi logistik dapat diartikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar -10,364 menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel independen yaitu total belanja, total asset, tingkat ketergantungan dan opini audit maka peluang pengungkapan laporan keuangan secara penuh (full disclosure) akan menurun sebesar 10,364.
- Nilai koefisien regresi total belanja sebesar -8,527 menunjukkan bahwa setiap unit kenaikan total belanja daerah maka peluang pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah secara penuh akan menurun sebesar 8,527. dengan asumsi bahwa variabel independen lain nilainya tetap.
- Nilai koefisien regresi total asset sebesar -85,398 menunjukkan bahwa setiap unit kenaikan total aset maka peluang pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah secara penuh akan menurun sebesar -85,398. dengan asumsi bahwa variabel independen lain nilainya tetap.
- Nilai koefisien regresi tingkat ketergantungan -3,647 menunjukkan bahwa setiap unit kenaikan tingkat ketergantungan maka peluang pengungkapan laporan keuangan

pemerintah daerah secara penuh akan menurun sebesar -3,647. dengan asumsi bahwa variabel independen lain nilainya tetap.

- e. Nilai koefisien regresi opini audit sebesar 8,629 menunjukkan bahwa setiap unit kenaikan opini audit maka peluang pengungkapan laporan keuangan secara penuh akan meningkat sebesar 8,629, dengan asumsi bahwa variabel independen lain nilainya tetap.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh total belanja, total asset, tingkat ketergantungan dan opini audit terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada pemerintah daerah se-Provinsi Jawa Barat. Pengujian signifikan koefisien dari setiap variabel independen menggunakan *probability value* dengan tingkat signifikan sebesar 5% (0,05). Apabila nilai signifikan kurang dari sama dengan 0,05 maka koefisien regresi adalah signifikan. Berdasarkan tabel 4.11 hasil dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa total belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan penuh Laporan Keuangan. Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -8,527 dan nilai signifikansinya sebesar 0,851 lebih besar dari α (5% atau 0,05). Hasil tersebut berarti total belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan penuh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini menolak hipotesis pertama (H_1).
- b. Hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa total asset berpengaruh terhadap pengungkapan penuh Laporan Keuangan. Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -85,398 dan nilai signifikansinya sebesar 0,028 lebih kecil dari α (5% atau 0,05). Hasil tersebut berarti total aset berpengaruh terhadap pengungkapan penuh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua (H_2).
- c. Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh terhadap pengungkapan penuh Laporan Keuangan. Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -3,647 dan nilai signifikansinya sebesar 0,001 lebih kecil dari α (5% atau 0,05). Hasil tersebut berarti tingkat ketergantungan berpengaruh terhadap pengungkapan penuh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga (H_3).
- d. Hipotesis Keempat (H_4) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap pengungkapan penuh Laporan Keuangan. Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 8,629 dan nilai signifikansinya sebesar 0,021 lebih kecil dari α (5% atau 0,05). Hasil tersebut berarti opini audit berpengaruh terhadap pengungkapan penuh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini menerima hipotesis Keempat (H_4).

5. PENUTUP

Merujuk pada hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan, total asset, tingkat ketergantungan dan opini audit berpengaruh terhadap pengungkapan penuh

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan oleh pihak eksternal dalam pengambilan keputusan karena laporan keuangan merupakan bentuk transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Sehingga, pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah bisa dijadikan sarana untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan dapat memberikan masukan berharga yang bersifat membangun untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2007. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2013. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2013. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2014. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2014. Jakarta: BPK RI.
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Boynton, W.C. et.al. 2006. Modern Auditing, Edisi kedelapan. Jakarta: Erlangga. 19 Jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 1 April 2014
- Gerring, J. & S. Thacker. 2004. Political Institutions and Corruption: The Role of Unitarism and Parliamentarism. Cambridge: Cambridge University Press.
- Halim, A. 2001. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartati, Y. 2011. Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Study Kabupaten Padang Pariaman & Kota Pariaman). Jurnal Universitas Andalas.
- Puspasari, N & E. Suwardi. 2012. Pengaruh Moralitas Individu dan Pengerndalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen Pada Konteks Pemerintahan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi.
- Purnomo, R. & Damayanti. 2007. Memerangi Korupsi DPRD: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah. Penelitian Bank Dunia.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Santoso, P. 2010. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. Jurnal Universitas Parahyangan.
- Soekrisno, A. 2004. Auditing. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.